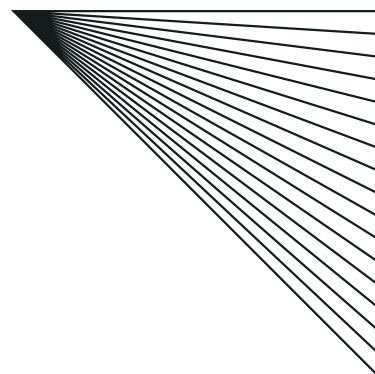




2025

LAPORAN KEUANGAN

*Laporan Keuangan Audited Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Riau*



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjungpinang, 07 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ridwan, S.H

Pembina/IV.a

NIP. 198507092010011020

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 07 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ridwan, S.H

Penata Tingkat I/III.d

NIP. 198507092010011020

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 17,420,332,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 37,077,470,949.00 atau mencapai 92,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 39,902,229,000.00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 4,834,285,736.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0,00; Aset Tetap sebesar Rp 4,687,843,920.00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp 146,441,816.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 148,590,322.00 dan Rp 4,685,695,414.00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00, sedangkan jumlah

beban adalah sebesar Rp 38,208,084,223.00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 38,208,084,223.00. Surplus Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp 13,513,000.00 dan Defisit Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 38,194,571,223.00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 41,266,306,340.00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 38,194,571,223.00 dikurangi koreksi lain-lain sebesar Rp 26,646,005,322.00, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 28,261,740,419.00 dan Penurunan Ekuitas sebesar Rp 36,580,610,926.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 4,685,695,414.00.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 (*Audited*) disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU

TAHUN 2025

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPRI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0,00	17,420,332.00	0	179,408,136.00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	17,420,332.00	0	179,408,136.00
BELANJA					
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.2	16,372,665,000.00	14,746,616,332.00	90.07	9,957,187,878.00
Belanja Barang	B.3	22,235,564,000.00	21,037,961,156.00	94.61	155,410,678,742.00
Jumlah Belanja Operasi		38,608,229,000.00	35,784,577,488.00	92,69	165,367,866,620.00
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.4	1,294,000,000.00	1,292,893,461.00	99,91	4,343,088,000.00
Jumlah Belanja Modal		1,294,000,000.00	1,292,893,461.00	99,91	4,343,088,000.00
JUMLAH BELANJA		39,902,229,000.00	37,077,470,949.00	92,92	169,710,954,620.00

II. NERACA

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPRI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0,00	35,403,788,152.00
Belanja Dibayar Dimuka		0,00	1,279,625,433.00
Persediaan		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	36,683,413,585.00
ASET TETAP			
Tanah	C.3	22,642,899.00	22,642,899.00
Peralatan dan Mesin	C.4	14,674,091,634.00	13,977,141,173.00
Gedung dan Bangunan	C.5	161,218,481.00	161,218,481.00
Akumulasi Penyusutan	C.6	(10,170,109,094.00)	(9,540,017,464.00)
Jumlah Aset Tetap		4,687,843,920.00	4,620,985,089.00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.7	0,00	77,200,000.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.8	146,441,816.00	0,00
Aset Lain-Lain		77,200,000.00	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(77,200,000.00)	(77,200,000.00)
Jumlah Aset Lainnya		146,441,816.00	0,00
JUMLAH ASET		4,834,285,736.00	41,304,398,674.00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	148,590,322.00	38,092,334.00
Utang Yang Belum Ditagihkan		0,00	0,00
Hibah yang Belum Disahkan		0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		148,590,322.00	38,092,334.00
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	4,685,695,414.00	41,266,306,340.00
JUMLAH EKUITAS		4,685,695,414.00	41,266,306,340.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4,834,285,736.00	41,304,398,674.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPRI LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0,00	435,313.00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	435,313.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	14,729,941,821.00	9,976,010,895.00
Beban Persediaan	D.3	0,00	205,215,000.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	11,126,307,375.00	72,255,044,259.00
Beban Pemeliharaan	D.5	418,795,938.00	1,396,832,047.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10,753,213,959.00	80,544,320,316.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1,179,825,130.00	1,072,838,427.00
JUMLAH BEBAN		38,208,084,223.00	165,450,260,944.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(38,208,084,223.00)	(165,449,825,631.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0,00	6,520,000.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	6,520,000.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00

URAIAN	Ref	2025	2024
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Penerimaan Kembali Belanja TAYL		0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	13,513,000.00	172,452,823.00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13,513,000.00	172,452,823.00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		13,513,000.00	178,972,823.00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(38,194,571,223.00)	(165,270,852,808.00)
POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(38,194,571,223.00)	(165,270,852,808.00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPRI
LAPORAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	41,266,306,340.00	42,645,220,914.00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(38,194,571,223.00)	(165,270,852,808.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS		(26,647,780,122.00)	9,345,000.00
Penyesuaian Nilai Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Koreksi atas Reklasifikasi		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3	(1,774,800.00)	9,345,000.00
Koreksi Lain-Lain	E.4	(26,646,005,322.00)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		28,261,740,419.00	163,882,593,234.00
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.5	28,323,595,451.00	87,800,939,484.00
Diterima dari Entitas Lain	E.6	(17,420,332.00)	(179,408,136.00)
Pengesahan Hibah Langsung	E.7	0,00	77,042,042,600.00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		0,00	0,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL		0,00	0,00
Transfer Masuk	E.8	0,00	105,584,000.00
Transfer Keluar	E.9	(44,434,700.00)	(886,564,714.00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(36,580,610,926.00)	(1,378,914,574.00)
EKUITAS AKHIR		4,685,695,414.00	41,266,306,340.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat.
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0517/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452).
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452).
 21. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tanjungpinang Nomor S-383/KPN.0501/2026 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2025 (Audited) tanggal 12 April 2026.

22. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686239/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rencana Strategis Bawaslu

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 89 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Visi Bawaslu

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”.

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *tepercaya*, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025-2029 adalah:

1. Penguatan Pengawasan Pemilu melalui pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang akuntabel dan efektif. Adapun strategi dalam peningkatan kualitas Pengawasan diantaranya dengan cara;
 - a. Mengidentifikasi dan memperhatikan titik kerawanan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
 - b. Kepekaan (sensitivity) dan responsivitas Pengawas Pemilu dalam mendeteksi potensi pelanggaran dan sengketa secara dini guna meminimalisir pelanggaran/sengketa.
 - c. Keahlian dan ketegasan pengawas Pemilu dalam menangani pelanggaran maupun sengketa proses Pemilu.

- d. Penegakkan hukum Pemilu dilakukan secara berkeadilan terbebas dari intervensi dan kepentingan politis.
 - e. Melakukan proses penegakan hukum Pemilu secara cermat dan tepat guna mengkualifikasi dan menentukan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
 4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
 5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 3 (Tiga) satuan kerja, yaitu:

No	Kode Satker	Nama Satker	Kewenangan
1	686239	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	KD
2	419772	Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	KD
3	686115	Sekretariat Bawaslu Kota Batam	KD

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau membawahi 3 kepala bagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a) Kepala Bagian Administrasi;
- b) Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
- c) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum;
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepri Tahun 2025 (Audited) ini merupakan laporan kementerian yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kepri. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepri per 31 Desember Tahun 2025 ini merupakan laporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul GLP dan Pelaporan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bawaslu mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, maka belanja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
- c. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- d. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (SPHL/SP3HL).
- e. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- f. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Belanja disajikan dalam LRA dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepri. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dan Setara

Kas disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- 6) Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk putusan pengadilan yang menyatakan bahwa uang pengganti perkara tindak pidana korupsi harus disetorkan selain ke kas negara (kas daerah/BUMN/BUMD) maka tagihan uang pengganti tersebut tidak disajikan pada pos aset lancar di neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 3) Untuk barang-barang yang memenuhi kriteria aset tetap walaupun dibeli dari MAK yang bukan peruntukannya, maka barang-barang tersebut tetap dibukukan sesuai dengan substansinya (*substance over form*).
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- 4) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 5) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 6) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas, dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi

penyusutan.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengadakan 12 (Dua Belas) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan lembaga terkait pelaksanaan tahapan pengawasan pemilihan umum tahun 2025. Rincian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar DIPA Awal dan DIPA Revisi Tahun 2025

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu Sebelum Revisi	Pagu Setelah Revisi	Alasan Revisi
0 (Awal)	29-Nov-2024	27,720,498.000	-	-
1 (POK)	24-Feb-2025	27,720,498.000	16,365,719.000	Revisi Pencantuman Hibah
2 (POK)	11-Mar-2025	16,365,719.000	49,036,812.000	Revisi Anggaran Hibah
3 (POK)	23-Apr-2025	49,036,812.000	49,036,812.000	Revisi Kanwil Halaman III DIPA
4 (POK)	10-Jul-2025	49,036,812.000	55,396,735.000	Relaksasi Anggaran Diblokir
5 (POK)	14-Jul-2025	55,396,735.000	31,479,559.000	Revisi Kanwil Pengurangan Pagu Hibah Sesuai Realisasi
6 (POK)	26-Ags-2025	31,479,559.000	31,479,559.000	Pergeseran Anggaran Perjalanan Dinas Antar Akun
7 (POK)	03-Okt-2025	31,479,559.000	31,978,351.000	Pemenuhan Belanja Operasional 002
8 (POK)	15-Okt-2025	31,978,351.000	31,978,351.000	Revisi Kanwil Halaman III DIPA
9 (POK)	27-Okt-2025	31,978,351.000	31,978,351.000	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK
10 (POK)	04-Nov-2025	31,978,351.000	39,902,229.000	Revisi DJA Penambahan Belanja Modal dan Perjalanan Dinas

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu Sebelum Revisi	Pagu Setelah Revisi	Alasan Revisi
11 (POK)	24-Nov-2025	39,902,229.000	39,902,229.000	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK
12 (POK)	12-Des-2025	39,902,229.000	39,902,229.000	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 17,420,332.00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepri adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025

Uraian	2025		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	17,420,332.00	-
Total	0,00	17,420,332.00	-

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 17,420,332.00, merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bawaslu Provinsi Kepri yang diperoleh dari:

Tabel 5. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

No	Nama Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Bawaslu Kota Batam	Rp 3,907,332.00
2	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Rp 8,558,000.00
3		Rp 2,455,000.00
4		Rp 2,500,000.00
Total		Rp 17,420,332.00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 37,077,470,949.00 atau 92,92 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 39,902,229,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	16,372,665,000.00	14,748,856,167.00	90,07
Belanja Barang	22,235,564,000.00	21,266,795,916.00	94,61
Belanja Modal	1,294,000,000.00	1,292,893,461.00	99,91
Total Belanja Kotor	39,902,229,000.00	37,308,545,544.00	93,50
Pengembalian Belanja	0,00	(231,074,595.00)	0,00
Total Belanja Bersih	39,902,229,000.00	37,077,470,949.00	92,92

Realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Program	2025		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi (RM)	353,064,000.00	307,514,768.00	87,10
Program Dukungan Manajemen	30,795,248,000.00	28,016,080,683.00	90,98
Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi (Hibah)	8,753,917,000.00	8,753,875,498.00	100
Total	39,902,229,000.00	37,077,470,949.00	92,92

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 37,077,470,949.00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 169,710,954,620 mengalami penurunan sebesar 78,15 persen disebabkan karena adanya efisiensi.

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 14,746,616,332.00 atau 92,92 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp 16,372,665,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,405,438,000.00	1,847,210,938.00	76,79
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4,334,438,000.00	4,198,852,050.00	96,87
Belanja Lembur	594,337,000.00	284,570,000.00	47,88
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4,235,583,000.00	3,831,509,883.00	90,46
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	4,802,869,000.00	4,586,713,296.00	95,50
Jumlah Belanja Kotor	16,372,665,000.00	14,748,856,167.00	90,08
Pengembalian Belanja Pegawai	0	(2,239,835.00)	0,00
Total	16,372,665,000.00	14,746,616,332.00	90,07

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 14,746,616,332.00 dan Rp 9,957,187,878.00 terjadi kenaikan sebesar 48,10 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Tahun

2024 dan 2025 sebanyak 79 Orang serta CPNS di Bawaslu Provinsi Kepri sebanyak 5 Orang.

Tabel 9. Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,847,210,938.00	1,381,224,861.00	33,74
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4,198,852,050.00	4,644,301,154.00	(9,59)
Belanja Lembur	284,570,000.00	134,750,000.00	111,18
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	3,831,509,883.00	1,310,151,333.00	192,45
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	4,586,713,296.00	2,486,984,101.00	84,43
Jumlah Belanja Kotor	14,748,856,167.00	9,957,411,449.00	48,12
Pengembalian Belanja Pegawai	(2,239,835.00)	(223,571.00)	901,85
Total	14,746,616,332.00	9,957,187,878.00	48,10

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp 14,746,616,332.00 seluruhnya berasal dari APBN yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran Gaji PNS serta uang makan PNS bulan Januari s.d. Desember 2025;
2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja PPPK bulan Januari s.d. Desember 2025;
3. Pembayaran Tunjangan Struktural bulan Januari s.d. Desember 2025;
4. Pembayaran Tunjangan Fungsional PNS bulan Januari s.d. Desember 2025;
5. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur di Bawaslu Provinsi untuk bulan Januari s.d. Desember 2025;
6. Belanja Uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota bulan Januari s.d. Desember 2025;
7. Belanja Tunjangan Kinerja PNS Bawaslu bulan Januari s.d. Desember 2025;
8. Belanja THR dan Gaji ke-13 PNS dan PPPK Tahun 2025;
9. Pembayaran THR dan Gaji ke-13 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp 14,746,616,332.00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Pegawai Bruto sebesar Rp 14,748,856,167.00 dikurangi pengembalian

belanja sebesar Rp 2,239,835.00. Adapun rician pengembalian belanja sebagai berikut:

Tabel 10. Pengembalian Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	235.00
2.	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	540,000.00
3.	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	370,000.00
4.	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	744,390.00
5.	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	150,690.00
6.	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	434,520.00
Total			2,239,835.00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Badan Pengawas Pemilu sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 21,037,961,156.00 atau 94,61 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp 22,235,564,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	3,668,922,000.00	3,418,444,089.00	92,68
Belanja Barang Non Operasional	2,723,615,000.00	2,633,783,103.00	96,7
Belanja Persediaan	17,825,000.00	0,00	0,00
Belanja Jasa	4,080,355,000.00	3,830,146,165.00	93,87
Belanja Pemeliharaan	509,754,000.00	418,795,938.00	82,16
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11,235,093,000.00	10,965,626,621.00	95,72
Jumlah Belanja Kotor	22,235,564,000.00	21,266,795,916.00	95,64
Pengembalian Belanja	0,00	(228,834,760.00)	0,00
Total	22,235,564,000.00	21,037,961,156.00	94,61

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 21,037,961,156.00 dan Rp

155,410,678,742.00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 86,46 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 disebabkan oleh telah berakhirnya Tahapan Pilkada 2024. Realisasi belanja barang tersebut diatas terdiri dari sumber dana rupiah murni (RM) dan hibah.

Tabel 12. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	3,418,444,089.00	7,581,634,910.00	(54,91)
Belanja Barang Non Operasional	2,633,783,103.00	44,989,461,496.00	(94,15)
Belanja Persediaan	0,00	20,536,000.00	(100)
Belanja Jasa	3,830,146,165.00	21,412,101,590.00	(82,11)
Belanja Pemeliharaan	418,795,938.00	1,396,832,047.00	(70,02)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10,965,626,621.00	83,387,342,446.00	(86,85)
Jumlah Belanja Kotor	21,266,795,916.00	158,787,908,489.00	(86,61)
Pengembalian Belanja	(228,834,760.00)	(3,377,229,747.00)	(93,22)
Total	21,037,961,156.00	155,410,678,742.00	(86,46)

B.4.1 Belanja Barang Rupiah Murni (RM)

Realisasi Belanja Rupiah Murni (RM) Badan Pengawas Pemilu sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 12,284,085,658.00 atau 91,12 persen dari Anggaran Belanja Barang (RM) sebesar Rp 13,481,647,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Belanja Barang (RM) Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	3,617,964,000.00	3,367,488,979.00	93,08
Belanja Barang Non Operasional	287.780.000	197,967,200.00	68,79
Belanja Persediaan	17,825,000.00	0.00	0,00
Belanja Jasa	3,419,674,000.00	3,169,467,850.00	92,68
Belanja Pemeliharaan	507,879,000.00	416,920,938.00	82,09
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,630,525,000.00	5,361,075,451.00	95,21
Jumlah Belanja Kotor	13,481,647,000.00	12,512,920,418.00	92,81
Pengembalian Belanja	0,00	(228,834,760.00)	0,00
Total	13,481,647,000.00	12,284,085,658.00	91,12

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 12,284,085,658.00 dan Rp 73,500,663,606.00. Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember

2025 mengalami penurunan sebesar 83,29 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024.

Tabel 14. Perbandingan Belanja Barang (RM) Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	3,367,488,979.00	7,148,995,907.00	(52,90)
Belanja Barang Non Operasional	197,967,200.00	18,843,377,061.00	(98,95)
Belanja Persediaan	0.00	20,536,000.00	(-100)
Belanja Jasa	3,169,467,850.00	9,712,205,903.00	(67,37)
Belanja Pemeliharaan	416,920,938.00	1,332,332,047.00	(68,71)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,361,075,451.00	39,820,446,435.00	(86,54)
Jumlah Belanja Kotor	12,512,920,418.00	76,877,893,353.00	(83,72)
Pengembalian Belanja	(228,834,760.00)	(3,377,229,747.00)	(93,22)
Total	12,284,085,658.00	73,500,663,606.00	(83,29)

Realisasi belanja barang (RM) sebesar Rp 12,284,085,658.00 yang dipergunakan untuk:

1. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
3. Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan;
4. Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal;
5. Pengelolaan Data dan Informasi;
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum; dan
7. Pengelolaan Organisasi Dan SDM.

B.4.2 Belanja Barang (Hibah)

Realisasi Belanja Barang (Hibah) Badan Pengawas Pemilu sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 8,753,875,498.00 atau 100 persen dari Anggaran Belanja Barang (hibah) sebesar Rp 8,753,917,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang Hibah per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	50,958,000.00	50,955,110.00	99,99
Belanja Barang Non Operasional	2,435,835,000.00	2,435,815,903.00	100
Belanja Persediaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa	660,681,000.00	660,678,315.00	100
Belanja Pemeliharaan	1,875,000.00	1,875,000.00	100

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,604,568,000.00	5,604,551,170.00	100
Jumlah Belanja Kotor	8,753,917,000.00	8,753,875,498.00	100
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	8,753,917,000.00	8,753,875,498.00	100

Realisasi Belanja Barang (Hibah) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 8,753,917,000.00 dan Rp 81,910,015,136.00. Realisasi Belanja Barang (Hibah) per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 89,31 persen dari Realisasi Belanja Barang (Hibah) 31 Desember 2024 disebabkan oleh telah berakhirnya Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.

Tabel 16. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	50,955,110.00	432,639,003.00	(88,22)
Belanja Barang Non Operasional	2,435,815,903.00	26,146,084,435.00	(90,68)
Belanja Persediaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa	660,678,315.00	11,699,895,687.00	(94,35)
Belanja Pemeliharaan	1,875,000.00	64,500,000.00	(97,09)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,604,551,170.00	43,566,896,011.00	(87,14)
Jumlah Belanja Kotor	8,753,875,498.00	81,910,015,136.00	(89,31)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	8,753,875,498.00	81,910,015,136.00	(89,31)

Realisasi belanja barang (Hibah) sebesar Rp 8,753,875,498.00 yang dipergunakan untuk:

1. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Badan Pengawas Pemilu sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1,292,893,461.00 atau 99,91 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp 1,294,000,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,294,000,000.00	1,292,893,461.00	99,91
Jumlah Belanja Kotor	1,294,000,000.00	1,292,893,461.00	99,91
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	1,294,000,000.00	1,292,893,461.00	99,91

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1,292,893,461.00 dan Rp 4,343,088,000.00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 70,23 persen dari Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 disebabkan oleh telah berakhirnya Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.

Tabel 18. Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,292,893,461.00	4,343,088,000.00	(70,23)
Jumlah Belanja Kotor	1,292,893,461.00	4,343,088,000.00	(70,23)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	1,292,893,461.00	4,343,088,000.00	(70,23)

Realisasi belanja modal sebesar Rp 1,292,893,461.00 yang dipergunakan untuk:

Tabel 19. Rincian Pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Box Camera	2	2,963,700.00
2	Coffee Maker	1	1,978,000.00
3	Lensa Kamera	2	24,000,002.00
4	Camera Digital	1	14,324,653.00
5	Lampu Blitz Kamera	2	28,649,306.00
6	Note book Lenovo K14 Gen 3 Intel Ultra7 - 21KL001HID	42	1,175,989,500.00
7	Printer	15	44,988,300.00
	JUMLAH	65	1,292,893,461.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Dibendahara Pengeluaran

Saldo Kas dibendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Kas dibendahara Pengeluaran merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 0,00 dan Rp 35,403,788,152.00.

Tabel 20. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
	(Rp)	(Rp)
Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	35,403,788,152.00
Total	0,00	35,403,788,152.00

C.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar 0,00 dan 1,279,625,433.00. Belanja dibayar dimuka adalah pembayaran yang dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Tabel 21. Rincian Belanja Dibayar Dimuka

Uraian	2025	2024
	(Rp)	(Rp)
Belanja Barang yang dibayar dimuka	0,00	1,279,625,433.00
Total	0,00	1,279,625,433.00

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 22,642,899.00 dan Rp 22,642,899.00.

Tabel 22. Perbandingan Rincian Tanah TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
	(Rp)	(Rp)
Tanah	22,642,899.00	22,642,899.00
Total	22,642,899.00	22,642,899.00

Aset tetap berupa Tanah merupakan transfer masuk dari Bawaslu RI pada Tahun 2024.

C.5 Peralatan Dan Mesin

Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 14,674,091,634.00 dan Rp 13,977,141,173.00. Adapun saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Portable Generating Set	1	34,999,800.00
2	Pompa Air	1	2,450,000.00
3	Station Wagon	6	3,610,800,000.00
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	10	3,381,150,000.00
5	Sepeda Motor	2	38,397,000.00
6	Mesin Penghitung Uang	1	3,812,998.00
7	Mesin Fotocopy Double Folio	1	55,750,000.00
8	Lemari Besi/Metal	40	142,857,520.00
9	Lemari Kayu	81	266,601,000.00
10	Filing Cabinet Besi	17	54,239,880.00
11	Filing Cabinet Kayu	2	9,700,000.00
12	Brankas	5	22,677,800.00
13	Lemari Katalog	1	5,170,000.00
14	Box Camera	2	2,963,700.00
15	Tabung Pemadam Api	12	17,661,000.00
16	CCTV	8	105,341,400.00
17	Alat Penghancur Kertas	15	79,030,000.00
18	Mesin Absensi	6	50,683,000.00
19	LCD Projector/Infocus	14	115,222,400.00
20	Alat Perekam Suara(Voice Pen)	1	1,081,001.00
21	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	13,143,297.00
22	Alat Sidik Jari	1	7,240,000.00
23	Meja Kerja Kayu	196	641,673,970.00
24	Kursi Besi/Metal	224	378,492,000.00
25	Sice	31	185,031,000.00
26	Meja Rapat	14	122,339,400.00
27	Meja Resepsionis	7	34,950,000.00
28	Cubikal	2	140,128,535.00
29	Sofa	1	11,500,000.00
30	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	8	25,233,800.00
31	Alat Pembersih Lainnya	1	560,000.00
32	Lemari Es	14	34,635,000.00
33	A.C Split	98	548,442,884.00
34	Rak Piring Alumunium	2	6,700,000.00
35	Televisi	9	55,206,000.00
36	Sound System	10	85,983,000.00
37	Mic Conference	9	35,595,400.00
38	Camera Video	2	31,700,000.00
39	Dispenser	1	2,100,000.00
40	Lambang Instansi	1	39,000,000.00
41	Coffe Maker	1	1,978,000.00

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
42	Handy Cam	5	43,140,000.00
43	Tangki Air	1	4,160,000.00
44	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1,000,000.00
45	Audio Amplifier	1	5,900,000.00
46	Microphone/Wireless MIC	13	65,445,000.00
47	Microphone/Boom Stand	4	8,500,000.00
48	Microphone Cable	3	3,084,000.00
49	Voice Recorder	8	9,500,000.00
50	Mixer Sound Sistem	1	2,700,000.00
51	Tripod Camera	3	6,600,000.00
52	Lensa Kamera	3	31,800,002.00
53	Head Set	2	8,795,000.00
54	Camera Digital	23	274,316,653.00
55	Lampu Blitz Kamera	10	48,742,306.00
56	Video Conference	1	33,000,000.00
57	LCD Monitor	1	1,200,000.00
58	Camera Conference	5	6,150,000.00
59	Mesin Barcode	1	3,500,000.00
60	Facsimile	1	900,000.00
61	Unit Transceiver VHF Stationary	1	4,887,999.00
62	Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	2	6,536,008.00
63	Unit Antena Transceiver VHF Stationary	1	2,762,999.00
64	Clinical Thermometer	6	16,603,000.00
65	Kursi Dorong	1	1,443,000.00
66	P.C Unit	93	851,387,342.00
67	Lap Top	71	829,637,067.00
68	Note Book	58	1,387,727,000.00
69	Tablet PC	10	56,238,000.00
70	Printer	100	266,900,091.00
71	Scanner	23	201,809,382.00
72	External/Portable Hardisk	27	35,786,000.00
73	Firewall	1	34,500,000.00
74	Pagar Semi Permanen	1	161,218,481.00
75	Software Komputer	1	77,200,000.00
JUMLAH		1.346	14,674,091,634.00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	13,977,141,173,00
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	1,292,893,461.00
- Transfer Masuk	Rp	3,000,000.00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	98,299,306.00
Mutasi Kurang:		
- Transfer Keluar	Rp	(596,971,000.00)
- Reklasifikasi Keluar	Rp	(98,299,306.00)

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(1,972,000.00)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	14,674,091,634.00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	Rp	10,152,375,059.00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	4,521,716,575.00

Penjelasan mutasi tambah yaitu :

- a. Pengadaan sebesar 1,292,893,461.00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk pembelian:

Tabel 24. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Box Camera	2	2,963,700.00
2	Coffee Maker	1	1,978,000.00
3	Lensa Kamera	2	24,000,002.00
4	Camera Digital	1	14,324,653.00
5	Lampu Blitz Kamera	2	28,649,306.00
6	Note book Lenovo K14 Gen 3 Intel Ultra7 – 21KL001HID	42	1,175,989,500.00
7	Printer	15	44,988,300.00
JUMLAH			1,292,893,461.00

- b. Transfer Masuk sebesar Rp 3,000,000.00 terdiri dari :

Tabel 25. Rincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Lemari Besi/Metal	1	3,000,000.00
	JUMLAH	1	3,000,000.00

Penjelasan mutasi keluar yaitu:

- c. Transfer Keluar sebesar Rp 596,971,000.00 terdiri dari:

Tabel 26. Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Lemari Besi/Metal	8	36,950,000.00
2	Lemari Kayu	19	29,750,000.00
3	Brandkas	1	4,900,000.00
4	Tabung Pemadam Api	3	3,000,000.00
5	CCTV – Camera Control Television System	1	14,850,000.00
6	Alat Penghancur Kertas	1	5,900,000.00

7	Mesin Absensi	1	6,950,000.00
8	LCD Projector/Infocus	1	5,035,000.00
9	Meja Kerja Kayu	25	55,950,000.00
10	Kursi Besi/Metal	29	46,300,000.00
11	Sice	7	44,730,000.00
12	Meja Rapat	2	19,100,000.00
13	Meja Resepsionis	1	4,900,000.00
14	Lemari Es	1	2,900,000.00
15	A.C. Split	15	65,308,000.00
16	Sound System	1	4,478,000.00
17	Microphone/Wireless MIC	2	9,300,000.00
18	Camera Digital	1	5,250,000.00
19	Camera Conference	1	1,230,000.00
20	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	3,444,000.00
21	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	2,676,000.00
22	P.C Unit	10	62,469,000.00
23	Lap Top	13	95,824,000.00
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	35,337,000.00
25	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	25,020,000.00
26	External/ Portable Hardisk	4	5,420,000.00
JUMLAH			596,971,000.00

d. Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp 1,972,000.00 terdiri dari:

Tabel 27. Rincian Koreksi Pencatatan Nilai

No	Peralatan Dan Mesin	Koreksi Pencatatan	Jumlah
1	Head Set	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	1,972,000.00
JUMLAH			1,972,000.00

C.6 Gedung Dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan Desember 2024 adalah Rp 161,218,481.00 dan Rp 161,218,481.00 yang merupakan pagar semi permanen sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 28. Rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

No.	Lokasi	Luas/Unit	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dompok Bukit Bestari Tanjungpinang	4.995 M ²	161,218,481.00	Tugu Tanda Batas/Pagar
Jumlah			161,218,481.00	

Mutasi atas Gedung dan Bangunan pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi atas Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	Rp 161,218,481.00
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 161,218,481.00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	Rp 17,734,035.00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 143,484,446.00

C.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 10,170,109,094.00 dan Rp 9,540,017,464.00.

Tabel 29. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	10,152,375,059.00	9,525,507,799.00
2	Gedung dan Bangunan	17,734,035.00	14,509,665.00
Total		10,170,109,094.00	9,540,017,464.00

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025:

Tabel 30. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	14,674,091,634.00	10,152,375,059.00	4,521,716,575.00
2	Gedung dan Bangunan	161,218,481.00	17,734,035.00	143,484,446.00
Total		14,835,310,115.00	10,170,109,094.00	4,665,201,021.00

C.8 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan

Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp 77,200,000.00.

C.9 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 senilai Rp 146.441.816.000 merupakan Pembayaran RPATA.

Tabel 31. Rincian RPATA per tanggal 31 Desember 2025

No	Penerima	Kode Akun	Kontrak / Tagihan (jika ada)		Jumlah
			Nomor	Tgl	
1	BP	521111	003/SPK-PPK/BAWASLU-KR/05/2025	14-Mei-25	3,166,000.00
2	BP	521111	002/SPK-PPK/BAWASLU-KR/05/2025	02-Mei-25	3,166,000.00
3	BP	521111	005/SPK-PPK/BAWASLU-KR/07/2025	14-Jul-25	3,166,000.00
4	BP	521111	004/SPK-PPK/BAWASLU-KR/07/2025	14-Jul-25	3,166,000.00
5	BP	522191	007/SPK-PPK/BAWASLU-KR/08/2025	01-Agu-25	23,000,000.00
6	BPP NATUNA	522191	003/SPK-PPK/KR-04/08/2025	01-Agu-25	13,872,000.00
7	BPP LINGGA	522191	023/SPK-PPK/KR-03/07/2025	31-Jul-25	18,400,000.00
8	BPP ANAMBAS	522191	EP-01K1G0AWJ4TQJC7XM7QW7R36G7	01-Agu-25	4,600,000.00
9	BPP KARIMUN	522191	EP-01K1FZRH8BJPTRS5SA92TX6WM9	01-Agu-25	4,624,000.00
10	BPP BINTAN	522191	EP-01K1F4JT62D8G5HZ42KECP01SR	31-Jul-25	9,248,000.00
11	BPP BINTAN	522191	EP-01K1F4AEZHY1CMRB57HZGY5ZFO	31-Jul-25	4,624,000.00
12	BPP KARIMUN	522191	EP-01K1FZKDZWDSFWMATR98GCSH96	01-Agu-25	4,624,000.00
13	BPP ANAMBAS	522191	EP-01K1G06YV43VFA7Y87GKEZKMFZ	01-Agu-25	9,200,000.00
14	BPP BATAM	522191	007/spk-ppk/kr-07/07/2025	28-Jul-25	9,244,908.00
15	BPP BATAM	522191	EP-01K87GQRZV26CHG9Z38MAVJWQ5	24-Okt-25	9,244,908.00
16	BPP NATUNA	522191	006/SPK-PPK/KR-04/10/2025	31-Okt-25	4,624,000.00
17	BPP BINTAN	522191	EP-01K8T6QVQW9AGTBZ5JJ3SMHHA6	30-Okt-25	4,624,000.00
18	BPP ANAMBAS	522191	EP-01K8T0205B6XV8ERV85P2GGYKA	01-Nov-25	4,600,000.00
19	BPP KARIMUN	522191	30/SPK-PPK/KR-01/10/2025	01-Nov-25	4,624,000.00
20	BPP KARIMUN	522191	031/SPK-PPK/KR-01/10/2025	01-Nov-25	4,624,000.00
JUMLAH					146,441,816.00

C.10 Aset Lain-Lain

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 77,200,000.00 dan 0,00. Aset Lain-Lain merupakan Software berupa Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan telah dihentikan penggunaannya dalam operasional Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Adapun nilai per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 32. Perbandingan Aset Lain-Lain TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	2025	2024
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	77,200,000.00	0,00
Total		77,200,000.00	0,00

Tabel 33. Rincian Aset Lain-Lain dan Akumulasi Amortisasi

No	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	8010101001	Software Komputer	1	77,200,000.00
Jumlah			1	77,200,000.00

C.11 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 77,200,000.00 dan Rp 77,200,000.00. Rincian akumulasi penyusutan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 34. Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Aset Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
A	Aset Lain-Lain		
1	Software Komputer	77,200,000.00	77,200,000.00
Total		77,200,000.00	77,200,000.00

Tabel 35. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi/ Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Lain-Lain			
1	Software Komputer	77,200,000.00	77,200,000.00	0,00
Total		77,200,000.00	77,200,000.00	0,00

C.12 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 148,590,322.00 dan Rp 38,092,334.00. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Tabel 36. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Naik/ Turun %
1	Utang kepada pihak ketiga	148,590,322.00	38,092,334.00	290,08
Total		148,590,322.00	38,092,334.00	290,08

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 senilai Rp 146,441,816.000 merupakan Pembayaran RPATA.

Tabel 37. Rincian RPATA per tanggal 31 Desember 2025

No	Penerima	Kode Akun	Kontrak / Tagihan (jika ada)		Jumlah
			Nomor	Tgl	
1	BP	521111	003/SPK-PPK/BAWASLU-KR/05/2025	14-Mei-25	3,166,000.00
2	BP	521111	002/SPK-PPK/BAWASLU-KR/05/2025	02-Mei-25	3,166,000.00
3	BP	521111	005/SPK-PPK/BAWASLU-KR/07/2025	14-Jul-25	3,166,000.00
4	BP	521111	004/SPK-PPK/BAWASLU-KR/07/2025	14-Jul-25	3,166,000.00
5	BP	522191	007/SPK-PPK/BAWASLU-KR/08/2025	01-Agu-25	23,000,000.00
6	BPP NATUNA	522191	003/SPK-PPK/KR-04/08/2025	01-Agu-25	13,872,000.00
7	BPP LINGGA	522191	023/SPK-PPK/KR-03/07/2025	31-Jul-25	18,400,000.00
8	BPP ANAMBAS	522191	EP-01K1G0AWJ4TQJC7XM7QW7R36G7	01-Agu-25	4,600,000.00
9	BPP KARIMUN	522191	EP-01K1FZRH8BJPTRS5SA92TX6WM9	01-Agu-25	4,624,000.00
10	BPP BINTAN	522191	EP-01K1F4JT62D8G5HZ42KECP01SR	31-Jul-25	9,248,000.00
11	BPP BINTAN	522191	EP-01K1F4AEZHY1CMRB57HZGY5ZFO	31-Jul-25	4,624,000.00
12	BPP KARIMUN	522191	EP-01K1FZKDZWDSFWMATR98GCSH96	01-Agu-25	4,624,000.00
13	BPP ANAMBAS	522191	EP-01K1G06YV43VFA7Y87GKEZKMFZ	01-Agu-25	9,200,000.00
14	BPP BATAM	522191	007/spk-ppk/kr-07/07/2025	28-Jul-25	9,244,908.00
15	BPP BATAM	522191	EP-01K87GQRZV26CHG9Z38MAVJWQ5	24-Okt-25	9,244,908.00
16	BPP NATUNA	522191	006/SPK-PPK/KR-04/10/2025	31-Okt-25	4,624,000.00
17	BPP BINTAN	522191	EP-01K8T6QVQW9AGTBZ5JJ3SMHHA6	30-Okt-25	4,624,000.00

18	BPP ANAMBAS	522191	EP-01K8T0205B6XV8ERV85P2GGYKA	01-Nov-25	4,600,000.00
19	BPP KARIMUN	522191	30/SPK-PPK/KR-01/10/2025	01-Nov-25	4,624,000.00
20	BPP KARIMUN	522191	031/SPK-PPK/KR-01/10/2025	01-Nov-25	4,624,000.00
JUMLAH					146,441,816.00

Belanja pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 senilai Rp 2,148,506.00 merupakan Jurnal Akrual Tunggakan Kekurangan Gaji PPPK dan Kekurangan Tunjangan Jabatan PNS bulan November dan Desember Tahun 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Belanja pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025

No	Penerima	Kode Akun	Untuk Pembayaran	Alasan Keterlambatan	Kontrak / Tagihan (jika ada)		Sumber Dana (Hibah/RM)	Jumlah
					Nomor	Tgl		
1	PPPK a.n (Nadar, Mayasari, Erwandi dan Risma)	511611	Pembayaran Kekurangan Gaji Pokok	Kenaikan Gaji Berkala	B-1115/KP.03.01/KB/12/2025	01-Nov-25	RM	784,800.00
2	PPPK a.n (Nadar, Mayasari, Erwandi dan Risma)	511621	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Istri/Suami	Kenaikan Gaji Berkala	B-1115/KP.03.01/KB/12/2026	01-Nov-25	RM	38,160.00
3	PPPK a.n (Nadar, Mayasari, Erwandi dan Risma)	511622	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Anak	Kenaikan Gaji Berkala	B-1115/KP.03.01/KB/12/2027	01-Nov-25	RM	15,264.00
4	PPPK a.n (Nadar, Mayasari, Erwandi dan Risma)	511619	Pembayaran Kekurangan Pembulatan	Kenaikan Gaji Berkala	B-1115/KP.03.01/KB/12/2028	01-Nov-25	RM	458.00
5	PPPK a.n (Mutiar)	511611	Pembayaran Kekurangan Gaji Pokok	Kenaikan Gaji Berkala	B-1115/KP.03.01/KB/12/2029	01-Nov-25	RM	201,600.00
6	PPPK a.n (Mutiar)	511621	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Istri/Suami	Kenaikan Gaji Berkala	B-1115/KP.03.01/KB/12/2030	01-Nov-25	RM	20,160.00
7	PPPK a.n (Mutiar)	511622	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Anak	Kenaikan Gaji Berkala	B-1115/KP.03.01/KB/12/2031	01-Nov-25	RM	8,064.00
8	PNS a.n (Dwi Suharani)	511124	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Jabatan	Perubahan Tunjangan Jabatan	5103/KP.04.00/SJ/11/2025	12-Nov-2025	RM	1.080,000.00
JUMLAH								2,148,506.00

C.13 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

C.14 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4,685,695,414.00 dan Rp 41,266,306,340,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset senilai Rp 4,834,285,736.00 dan kewajiban senilai Rp 148,590,322.00. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Beban Pegawai**

Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 14,729,941,821.00 dan Rp 9,976,010,895.00 mengalami kenaikan sebesar 47,654 persen dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya pembayaran atas adanya Penambahan PPPK Tahun 2024 sebanyak 82 Orang dan adanya penambahan pembayaran gaji dan Tunjangan CPNS di Bawaslu Provinsi Kepri sebanyak 23 Orang.

Tabel 39. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.844.106.686.00	1,384,275,307.00	33,22
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4,198,852,050.00	4,644,301,154.00	(9,59)
Beban Uang Lembur	284,570,000.00	134,750,000.00	111,18
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	3.831.248.789.00	1,310,151,333.00	192,43
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	4,571,164,296.00	2,502,533,101.00	82,66
Total	14,729,941,821.00	9,976,010,895.00	47,654

Terdapat selisih beban pegawai antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp 16,674,511.00 merupakan Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Rp 2,148,506.00 dan Jurnal Balik Belanja Pegawai yang masih harus dibayar TAYL Rp 18,823,017.00.

Beban pegawai per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		
- Beban Gaji Pokok PNS	Rp	1,233,394,700.00
- Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp	18,658.00
- Beban Tunj.Suami/Istri PNS	Rp	68,556,126.00
- Beban Tunj.Anak	Rp	16,581,357.00
- Beban Tunj.Struktural	Rp	70,900,000.00
- Beban Tunj.Fungsional PNS	Rp	39,004,000.00

- Beban Tunj.PPh PNS	Rp	5,388,142.00
- Beban Tunj.Beras PNS	Rp	69,957,720.00
- Beban Uang Makan PNS	Rp	283,555,000.00
- Beban Tunjangan Umum PNS	Rp	58,945,000,00
- Belanja UK Pejabat Negara	Rp	4,198,852,050.00
- Beban Gaji Pokok PPPK	Rp	2,666,580,640.00
- Beban Pembulatan Gaji PPPK	Rp	40,523.00
- Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	Rp	173,716,630.00
- Beban Tunjangan Anak PPPK	Rp	46,520,040.00
- Beban Tunjangan Fungsional PPPK	Rp	245,100,000.00
- Beban Tunjangan Beras PPPK	Rp	160,953,450,00
- Beban Uang Makan PPPK	Rp	523,594,000.00
- Beban Tunjangan Umum PPPK	Rp	13,675,000.00
- Belanja Uang Lembur	Rp	118,600,000.00
- Belanja Uang Lembur PPPK	Rp	165,970,000.00
- Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	Rp	1,839,028,451.00
- Beban Pegawai (Tunjangan/Kegiatan/Kinerja)	Rp	2,747,684,845.00
- Belanja Pegawai YMHD	Rp	2,148,506.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	14,748,764,838.00
Mutasi Kurang:		
- Jurnal Balik Belanja Pegawai yang masih harus dibayar TAYL	Rp	18,823,017.00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(18,823,017.00)
Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025	Rp	14,729,941,821.00

Mutasi Tambah merupakan Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (YMHD) Tahun Anggaran Berjalan 2025. Adapun rincian atas belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp 2,148,506.00

Tabel 40. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025

No	Uraian	No SPP	Nominal SPP
1	Pembayaran Belanja Kekurangan Gaji Pokok PPPK	511611	986,400.00
2	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunj.Istri/Suami PPPK	511621	58,320.00
3	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunj. Anak PPPK	511622	23,328.00
4	Pembayaran Belanja Kekurangan Pembulatan PPPK	511619	458.00
5	Pembayaran Belanja Kekurangan Tunjangan Jabatan PNS	511124	1,080,000.00
Total			2,148,506.00

D. 2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 11,126,307,375.00 dan Rp 72,255,044,259.00.

**Tabel 41. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	2,999,412,091.00	6,730,405,867.00	(55,43)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	287,000.00	50.600,00	467,19
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	235,208,560.00	354,176,000.00	(33,59)
Beban Barang Operasional Lainnya	160,500,023.00	494,190,400.00	(67,52)
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan	598,549,119.00	7,848,158,657.00	(92,37)
Beban Honor Output Kegiatan	1,963,867,740.00	33,246,940,200.00	(94,09)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	58,711,244.00	3,377,773,490.00	(98,26)
Beban Langganan Listrik	272,582,623.00	466,275,798.00	(41,54)
Beban Langganan Telepon	3,685,200.00	19,509,835.00	(81,11)
Beban Langganan Air	24,379,950.00	68,902,314.00	(64,62)
Beban Sewa	3,925,466,532.00	14,022,869,849.00	(72,01)
Beban Jasa Profesi	280,204,800.00	1,686,000,000.00	(83,38)
Beban Jasa Lainnya	603,452,493.00	3,939,791,249.00	(84,68)
Total	11,126,307,375.00	72,255,044,259.00	(84,601)

Terjadi penurunan beban barang dan jasa sebesar 84,601 persen per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Penurunan Beban Barang dan Jasa disebabkan karena :

1. Telah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Terjadinya efisiensi besar-besaran yang memangkas sejumlah belanja operasional diantaranya termasuk belanja barang dan jasa;

3. Telah selesainya kontrak sewa Gedung dan meublair di masing-masing kabupaten/kota semasa dalam mendukung tahapan Pilkada Serentak tahun 2024.

Terdapat selisih beban Barang dan Jasa antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp 1,261,886,116.00 merupakan Jurnal Balik Beban Sewa Rp 1,279,625,433.00 dan Jurnal Balik Belanja Yang Masih Harus Dibayar TAYL Rp 17,739,317.00.

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		
- Belanja Keperluan Perkantoran	Rp	3,004,496,408.00
- Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		287,000.00
- Belanja Honor Operasional Satker	Rp	235,208,560.00
- Beban Barang Operasional Lainnya	Rp	160,500,023.00
- Belanja Bahan	Rp	598,549,119.00
- Belanja Honor Output Kegiatan	Rp	1,976,522,740.00
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp	58,711,244.00
- Belanja Langganan Listrik	Rp	272,582,623.00
- Belanja Langganan Telepon	Rp	3,685,200.00
- Belanja Langganan Air	Rp	24,379,950.00
- Belanja Sewa	Rp	2,645,841,099.00
- Belanja Jasa Profesi	Rp	280,204,800.00
- Belanja Jasa Lainnya	Rp	603,452,493.00
- Jurnal Balik Beban Sewa atas Sewa dibayar dimuka TAYL	Rp	1,279,625,433.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	11,144,046,692.00
Mutasi Kurang:		
- Jurnal Balik Belanja Barang YMHD TAYL		(17,739,317.00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(17,739,317.00)

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025	Rp	11,126,307,375.00
--	-----------	--------------------------

D. 3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 418,795,938.00 dan Rp 1,396,832,047.00.

**Tabel 42. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan	418,795,938.00	1,396,832,047.00	(70,018)

Terjadi penurunan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 sebesar 70,018 persen dibandingkan pada 31 Desember 2024 hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun 2025.

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (LRA)	Rp	418,795,938.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	418,795,938.00
Mutasi Kurang:		0,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025	Rp	418,795,938.00

D. 4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 10,753,213,959.00 dan Rp 80,544,320,316.00.

Tabel 43. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,713,831,942.00	10,896,742,450.00	(47,56)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,473,664,141.00	18,876,199,035.00	(81,60)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	545,960,000.00	27,369,003,655.00	(98,01)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,019,757,876.00	23,402,375,176.00	(95,64)
Total	10,753,213,959.00	80,544,320,316.00	(86,649)

Telah berakhirnya tahapan Pemilu Serentak 2025 dapat menjadi pendorong utama terjadinya penurunan belanja perjalanan dinas sebesar 86,649 persen pada 31 Desember 2025 dibandingkan pada 31 Desember 2024. Selain itu, terjadinya efisiensi juga salah satu faktor penurunan belanja perjalanan dinas pada tahun 2025.

Terdapat selisih beban Perjalanan Dinas antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp 1,530,000.00 yang merupakan Jurnal Balik Belanja YMHD TAYL. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		
- Belanja Perjalanan Dinas (LRA)	Rp	10,754,743,959.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	10,754,743,959.00
Mutasi Kurang:		
- Jurnal Balik Belanja Perjalanan Dinas YMHD TAYL	Rp	(1,530,000.00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(1,530,000.00)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025	Rp	10,753,213,959.00

Mutasi tambah berupa Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 10,753,213,959.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Nominal
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,713,831,942.00
524113	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	545,960,000.00
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	1,019,757,876.00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	3,473,664,141.00
Total		10,753,213,959.00

D. 5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1,179,825,130.00 dan Rp 1,072,838,427.00. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember

2025 mengalami kenaikan sebesar 9,972 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

**Tabel 45. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,224,370.00	3,224,370.00	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,176,600,760.00	1,069,614,057.00	10
Total	1,179,825,130.00	1,072,838,427.00	9,972

D. 6 Kegiatan Non Operasional

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 13,513,000.00 dan Rp 172,452,823.00.

**Tabel 46. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	13,513,000.00	172,452,823.00	(92,164)
Total	13,513,000.00	172,452,823.00	(92,164)

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13,513,000.00 yang merupakan Penyetoran pengembalian Belanja TAYL sebesar Rp 13,513,000.00 dengan rincian penerimaan sebagai berikut.

Tabel 47. Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

Uraian	NTPN	NTB	ID Billing	Unit Penyetor	Nominal
Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	2D29B0NA 0DE3P588	250106021002	82025010 6696968	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	8,558,000.00
Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	E2A186U8 F7EQK5FE	250106021067	82025010 6697198	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	2,455,000.00
Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	8D06548V VO12E1AQ	250422020188	82025042 2347098	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	2,500,000.00
Total					13,513,000.00

D. 7 Surplus/Defisit LO

Defisit LO untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (38,194,571,223.00) dan Rp (165,270,852,808.00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 41,266,306,340.00 dan Rp 42,645,220,914.00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar Rp (38,194,571,223.00) dan Rp (165,270,852,808.00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Koreksi yang mengurangi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (26,647,780,122.00) dan Rp 9,345,000.00.

Tabel 48. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1,774,800.00)	9,345,000.00
Koreksi Lainnya	(26,646,005,322.00)	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00	0,00
Total	26,647,780,122.00	17,420,332.00

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Berkurang)	Akumulasi Penyusutan	Jumlah
1.	Head Set	2024	986,000.00	98,600.00	887,400.00

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Berkurang)	Akumulasi Penyusutan	Jumlah
2.	Head Set	2024	986,000.00	98,600.00	887,400.00
Jumlah			1,972,000.00	197,200.00	1,774,800.00

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp 1,774,800.00 merupakan Tindak Lanjut Pengelolaan BMN di Lingkungan Bawaslu terkait Temuan BPK, perlu dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang berupa Head Set (Peralatan Command Center) senilai Rp 986.000,00 per unit.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 28,261,740,419.00 dan Rp 163,882,593,234.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 50. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	28,323,595,451.00	87,800,939,484.00
Diterima dari Entitas Lain	(17,420,332.00)	(179,408,136.00)
Pengesahan Hibah Langsung	28,261,740,419.00	77,042,042,600.00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0,00	0,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0,00	0,00
Transfer Keluar	(44,434,700.00)	(886,564,714.00)
Transfer Masuk	0,00	105,584,000.00
Jumlah	(28,261,740,419.00)	163,882,593,234.00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp 17,420,332.00 merupakan pendapatan PNBK tahun 2025, terdiri dari:

Tabel 51. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas lain	Jumlah (Rp)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	17,420,332.00
Total	17,420,332.00

Sedangkan DKEL sebesar Rp 28,323,595,451.00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari :

Tabel 52. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	14,748,856,167.00
Belanja Barang	12,512,920,418.00
Belanja Modal	1,292,893,461.00
Jumlah Kotor	28,554,670,046.00
Pengembalian Belanja Pegawai	2,239,835.00
Pengembalian Belanja Barang	228,834,760.00
Jumlah	28,323,595,451.00

Transfer Keluar

Transfer Keluar dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau kepada Bawaslu Kota Batam berupa peralatan dan mesin dengan total nilai buku sebesar Rp 44,434,700.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Transfer Keluar Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025

Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku (Rp)
Lemari Besi/Metal	8	36,950,000.00	(36,950,000.00)	0,00
Lemari Kayu	19	29,750,000.00	(29,750,000.00)	0,00
Brandkas	1	4,900,000.00	(4,900,000.00)	0,00
Tabung Pemadam Api	3	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0,00
CCTV - Camera Control Television System	1	14,850,000.00	(14,850,000.00)	0,00
Alat Penghancur Kertas	1	5,900,000.00	(5,900,000.00)	0,00

Mesin Absensi	1	6,950,000.00	(6,950,000.00)	0,00
LCD Projector/Infocus	1	5,035,000.00	(5,035,000.00)	0,00
Meja Kerja Kayu	25	55,950,000.00	(55,950,000.00)	0,00
Kursi Besi/Metal	29	46,300,000.00	(46,300,000.00)	0,00
Sice	7	44,730,000.00	(44,730,000.00)	0,00
Meja Rapat	2	19,100,000.00	(19,100,000.00)	0,00
Meja Resepsionis	1	4,900,000.00	(4,900,000.00)	0,00
Lemari Es	1	2,900,000.00	(580,000.00)	2,320,000.00
A.C. Split	15	65,308,000.00	(65,308,000.00)	0,00
Sound System	1	4,478,000.00	(4,478,000.00)	0,00
Microphone/Wireless MIC	2	9,300,000.00	(9,300,000.00)	0,00
Camera Digital	1	5,250,000.00	(5,250,000.00)	0,00
Camera Conference	1	1,230,000.00	(738,000.00)	492,000.00
Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	3,444,000.00	(688,800.00)	2,755,200.00
Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	2,676,000.00	(2,676,000.00)	0,00
P.C Unit	10	62,469,000.00	(62,469,000.00)	0,00
Lap Top	13	95,824,000.00	(73,474,000.00)	22,350,000.00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	35,337,000.00	(20,112,000.00)	15,225,000.00
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	25,020,000.00	(23,727,500.00)	1,292,500.00
External/Portable Hardisk	4	5,420,000.00	(5,420,000.00)	0,00
Jumlah	65	596,971,000.00	(552,536,300.00)	44,434,700.00

E.5 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 36,580,610,926.00 dan Penurunan Ekuitas pada tahun 2024 adalah sebesar 1,378,914,574.00.

Tabel 54. Perbandingan Kenaikan dan Penurunan Ekuitas
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(38,194,571,223.00)	(165,270,852,808.00)
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(26,647,780,122.00)	9,345,000.00
Transaksi Antar Entitas	28,261,740,419.00	163,882,593,234.00
Jumlah	(36,580,610,926.00)	(1,378,914,574.00)

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4,685,695,414.00 dan Rp 41,266,306,340.00.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp 41,266,306,340,00 ditambah penurunan ekuitas sebesar Rp (36,580,610,926.00).

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.

Berikut dibawah Struktur Organisasi di Bawaslu terbaru berdasarkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,:

A. Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri atas:

- 1) Plt. Kepala Sekretariat : **Siska Ernida Wati, S.Si**
- 2) Kepala Bagian Administrasi : **Siska Ernida Wati, S.Si**
- 3) Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat :
Ridwan, S.H
- 4) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum : **Takwin Saleh, S.H**
- 5) Bendahara Pengeluaran : **Dameria Siahaan, A.Md. Ak**

B. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan terdiri atas:

- 1) Koordinator Sekretariat : **Sulistiawan, S.Sos**
- 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Pramesti Putri Ismayadewi**

b. Sekretariat Bawaslu Kota Batam terdiri atas:

- 1) Kepala Sekretariat : **Esther Irianti Lombogia, S.T., M.E**
- 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Novelysa Samosir, S.Si**

c. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun terdiri atas:

- 1) Koordinator Sekretariat : **Azim, S.Pd.I**
- 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Sutarman Edi**

d. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga terdiri atas:

- 1) Koordinator Sekretariat : **Darol Kadmi**
- 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Surrahman**

e. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas:

- 1) Koordinator Sekretariat : **Lindawati, S.M.**
- 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Dameria Siahaan, A.Md. Ak**

f. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna terdiri atas:

- 1) Koordinator Sekretariat : **Fisabillillah**
- 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Hanapi**

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepri sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 6 rekening, yang terdiri dari:

- a. Rekening Virtual Pengeluaran sejumlah 2 rekening, yang terdiri atas Rekening BPG Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan BPG Bawaslu Kota Batam;
- b. Rekening Virtual Pengeluaran Pembantu sejumlah 4 rekening, masing-masing Kabupaten/Kota memiliki 1 rekening yang terdiri

atas Rekening BPG dan 1 Rekening Pegawai yang a.n. Yesi sebagai Staf Pengelola Keuangan di Bawaslu Anambas.

2. Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 53. Pejabat Perbendaharaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1	Siska Ernida Wati, S.Si	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Ridwan, S.H.	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Dwi Suharani Raja Guk Guk	Pejabat Penandatangan SPM
4	Dameria Siahaan, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran
5	Siska Ernida Wati, S.Si.	Pejabat Pembuat Komitmen Hibah
6	Dameria Siahaan, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Hibah

Berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nomor: 48/KU.03/KR/07/2025 Tanggal 01 Juli 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 6/KU.03/KR/01/2025 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025:

Tabel 54. Pejabat Perbendaharaan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama	Jabatan
1	Sulistiawan, S.Sos	Pejabat Pembuat Komitmen Kab. Bintan
	Pramesti Putri	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab. Bintan
2	Esther Irianti Lombogia, S.T., M.E	Pejabat Pembuat Komitmen Kota Batam
	Novelysa Samosir, S.Si	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kota Batam
3	Azim, S.Pd.I.	Pejabat Pembuat Komitmen Kab. Karimun
	Sutarman Edi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab. Karimun
4	Darol Kadmi	Pejabat Pembuat Komitmen Kab. Lingga
	Surrahman	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab. Lingga
5	Lindawati, S.M.	Pejabat Pembuat Komitmen Kab. Kep.Anambas
	Dameria Siahaan, A.Md.Ak	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab. Kep.Anambas
6	Fisabilillah, S.Pd.I.	Pejabat Pembuat Komitmen Kab. Natuna
	Hanapi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab. Natuna

F.3. Tindak lanjut temuan BPK

Pada tahun 2025 terdapat pemeriksaan BPK pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2025 seluruh pemeriksaan BPK dengan rincian:

- a. Realisasi belanja barang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 532,885,168.00
- b. Realisasi belanja sewa gedung kantor kurang potong pajak sebesar Rp 6,191,646.19
- c. Realisasi belanja perjalanan dinas lebih bayar sebesar Rp 1,204,680.00
- d. Pengadaan Belanja Bahan Seminar Kit Kegiatan Bawaslu Prov. Kepulauan Riau Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Pemahalan Sebesar Rp16,273,500.00

maupun pemeriksaan BPKP sebesar Rp 208,133,196.00 pada periode Semester I Tahun 2024 (1 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025) pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah seluruhnya ditindak lanjuti pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

F.4 Informasi Capaian Output

Dalam rangka mewujudkan belanja K/L yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, telah ditetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti PER-4/PB/2020. (Laporan Realisasi Kinerja Terlampir).

F.5 Program Prioritas Nasional

Prioritas Nasional VII - Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 9 (sembilan) kegiatan prioritas, yang tersebar di 2 (dua) Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp 8,753,917,000.00 dan realisasi sebesar Rp 8,753,875,498.00 dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga : 115 - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Unit Organisasi : 115.01 - Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Satker : Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 55. Program Prioritas Nasional

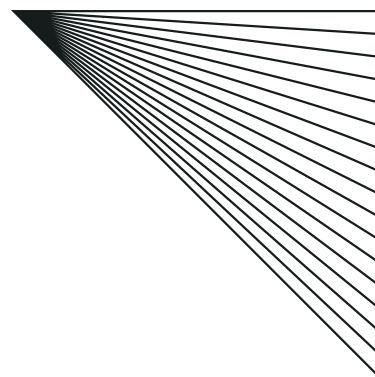
Program Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	8,753,917,000.00	8,753,875,498.00	100	Predikat	Baik	Baik	100



2025

LAPORAN KEUANGAN

*Laporan Keuangan Audited Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Riau*



LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-14
Kementerian Negara/Lembaga : 115 - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Eselon 1 : 115.01 - Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Wilayah/Provinsi : 32.51 - KOTA BATAM/KEPULAUAN RIAU
Satuan Kerja : 686239 - SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 28-04-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	39,902,229,000.00	37,078,381,184.00	92.92%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	39,902,229,000.00	37,078,381,184.00	92.92%							
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	9,106,981,000.00	9,061,390,266.00	99.5%							
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	8,983,151,000.00	8,976,082,126.00	99.92%							
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	25,904,000.00	25,556,000.00	98.66%							
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	25,904,000.00	25,556,000.00	98.66%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	1.34%		
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	8,957,247,000.00	8,950,526,126.00	99.92%							
001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	203,330,000.00	196,650,628.00	96.72%	5.0000	Laporan	5.0000	100%	3.28%		
002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	4,338,800,000.00	4,338,784,123.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01	682,627,000.00	682,622,612.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 02	1,044,506,000.00	1,044,497,450.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03	659,810,000.00	659,805,780.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04	574,939,000.00	574,934,899.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 05	924,544,000.00	924,541,368.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 06	528,691,000.00	528,689,266.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%		
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	27,880,000.00	26,680,000.00	95.7%							
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	27,880,000.00	26,680,000.00	95.7%							
002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	27,880,000.00	26,680,000.00	95.7%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	4.3%		
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	95,950,000.00	58,628,140.00	61.1%							
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	95,950,000.00	58,628,140.00	61.1%							
002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	95,950,000.00	58,628,140.00	61.1%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	38.9%		
WA	Program Dukungan Manajemen	30,795,248,000.00	28,016,990,918.00	90.98%							
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	13,245,000.00	12,987,000.00	98.05%							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	13,245,000.00	12,987,000.00	98.05%							
961	Layanan Reformasi Kinerja	13,245,000.00	12,987,000.00	98.05%	10.0000	Dokumen	10.0000	100%	1.95%		
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	35,385,000.00	29,433,300.00	83.18%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	35,385,000.00	29,433,300.00	83.18%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	21,965,000.00	18,719,900.00	85.23%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	14.77%		
963	Layanan Data dan Informasi	13,420,000.00	10,713,400.00	79.83%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	20.17%		
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	25,365,698,000.00	23,112,258,736.00	91.12%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	23,722,261,000.00	21,490,220,936.00	90.59%							
956	Layanan BMN	16,987,000.00	16,805,000.00	98.93%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	1.07%		
994	Layanan Perkantoran	23,705,274,000.00	21,473,415,936.00	90.58%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	9.42%		
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,294,000,000.00	1,292,893,461.00	99.91%							
951	Layanan Sarana Internal	1,294,000,000.00	1,292,893,461.00	99.91%	65.0000	Unit	65.0000	100%	0.09%		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	349,437,000.00	329,144,339.00	94.19%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	35,612,000.00	30,094,458.00	84.51%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	15.49%		
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	241,870,000.00	236,382,616.00	97.73%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	2.27%		
955	Layanan Manajemen Keuangan	60,225,000.00	51,050,265.00	84.77%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	15.23%		
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	11,730,000.00	11,617,000.00	99.04%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	0.96%		
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	5,380,920,000.00	4,862,311,882.00	90.36%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,342,015,000.00	4,835,916,882.00	90.53%							
957	Layanan Hukum	30,050,000.00	29,382,400.00	97.78%	5.0000	Laporan	5.0000	100%	2.22%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
962	Layanan Umum	5,306,040,000.00	4,803,616,982.00	90.53%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	9.47%		
969	Layanan Bantuan Hukum	5,925,000.00	2,917,500.00	49.24%	3.0000	Laporan	3.0000	100%	50.76%		
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	38,905,000.00	26,395,000.00	67.84%							
954	Layanan Manajemen SDM	38,905,000.00	26,395,000.00	67.84%	175.0000	Orang	175.0000	100%	32.16%		

**LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 1/KU.03/KR/02/2026**

BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2026, pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran adalah efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran adalah memadai.

Tanjungpinang, 31 Januari 2026
Pimpinan Tim,



SISKA ERNIDA WATI, S.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19900924 201503 2 003

Lampiran I:

Laporan Hasil Penilaian PIPK Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

- 1. Akun Kas Lainnya di K/L dari Hibah
- 2. Akun Kas Lainnya di BP
- 3. Akun Beban Perjalanan Dinas
- 4. Akun Peralatan dan Mesin

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

NO				Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
1	Tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU 686239

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 7:34 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	17,420,332	17,420,332	0	0	179,408,136	(179,408,136)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	17,420,332	17,420,332	0	0	179,408,136	(179,408,136)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	17,420,332	17,420,332	0	0	179,408,136	(179,408,136)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	39,902,229,000	37,077,470,949	(2,824,758,051)	93	216,075,411,000	169,710,954,620	46,364,456,380	79
1. Belanja Pegawai	16,372,665,000	14,746,616,332	(1,626,048,668)	90	10,608,017,000	9,957,187,878	650,829,122	94
2. Belanja Barang	22,235,564,000	21,037,961,156	(1,197,602,844)	95	200,917,788,000	155,410,678,742	45,507,109,258	77
3. Belanja Modal	1,294,000,000	1,292,893,461	(1,106,539)	100	4,549,606,000	4,343,088,000	206,518,000	95
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU 686239

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 7:34 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	39,902,229,000	37,077,470,949	(2,824,758,051)	93	216,075,411,000	169,710,954,620	46,364,456,380	79
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

TANJUNGPINANG, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA

KPA

RIDWAN

NIP. 198507092010011020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 686239
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 9:35 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:15 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	292,980,000	1,233,657,000	1,233,394,700	0	1,233,394,700	99.98	262,300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	88,000	749,000	18,893	235	18,658	2.49	730,342
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	26,808,000	112,078,000	68,556,126	0	68,556,126	61.17	43,521,874
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,468,000	61,902,000	16,581,357	0	16,581,357	26.79	45,320,643
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	42,400,000	89,210,000	71,440,000	540,000	70,900,000	79.48	18,310,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,360,000	50,800,000	39,004,000	0	39,004,000	76.78	11,796,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	209,292,000	283,876,000	5,388,142	0	5,388,142	1.9	278,487,858
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	25,696,000	112,566,000	69,957,720	0	69,957,720	62.15	42,608,280
511129	Belanja Uang Makan PNS	311,760,000	390,000,000	283,555,000	0	283,555,000	72.71	106,445,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	18,500,000	70,600,000	59,315,000	370,000	58,945,000	83.49	11,655,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	952,352,000	2,405,438,000	1,847,210,938	910,235	1,846,300,703	76.76	559,137,297
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,201,400,000	4,334,438,000	4,198,852,050	0	4,198,852,050	96.87	135,585,950
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	4,201,400,000	4,334,438,000	4,198,852,050	0	4,198,852,050	96.87	135,585,950
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	993,117,000	2,698,463,000	2,666,580,640	0	2,666,580,640	98.82	31,882,360
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	310,000	887,000	40,523	0	40,523	4.57	846,477
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	99,313,000	248,846,000	174,461,020	744,390	173,716,630	69.81	75,129,370
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	71,505,000	131,383,000	46,670,730	150,690	46,520,040	35.41	84,862,960
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	234,360,000	306,600,000	245,100,000	0	245,100,000	79.94	61,500,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	126,728,000	259,004,000	161,387,970	434,520	160,953,450	62.14	98,050,550
511628	Belanja Uang Makan PPPK	206,460,000	532,680,000	523,594,000	0	523,594,000	98.29	9,086,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	57,720,000	13,675,000	0	13,675,000	23.69	44,045,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,731,793,000	4,235,583,000	3,831,509,883	1,329,600	3,830,180,283	90.43	405,402,717
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	190,446,000	178,932,000	118,600,000	0	118,600,000	66.28	60,332,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	196,850,000	415,405,000	165,970,000	0	165,970,000	39.95	249,435,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	387,296,000	594,337,000	284,570,000	0	284,570,000	47.88	309,767,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,601,850,000	2,009,970,000	1,839,028,451	0	1,839,028,451	91.5	170,941,549
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,472,764,000	2,792,899,000	2,747,684,845	0	2,747,684,845	98.38	45,214,155
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	3,074,614,000	4,802,869,000	4,586,713,296	0	4,586,713,296	95.5	216,155,704

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 686239
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 9:35 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:15 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	10,347,455,000	16,372,665,000	14,748,856,167	2,239,835	14,746,616,332	90.07	1,626,048,668
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,138,773,000	3,242,923,000	3,022,448,506	17,952,098	3,004,496,408	92.65	238,426,592
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,668,000	3,600,000	287,000	0	287,000	7.97	3,313,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	341,304,000	247,455,000	235,208,560	0	235,208,560	95.05	12,246,440
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	186,660,000	174,944,000	160,500,023	0	160,500,023	91.74	14,443,977
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	6,686,405,000	3,668,922,000	3,418,444,089	17,952,098	3,400,491,991	92.68	268,430,009
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	379,515,000	682,182,000	598,549,119	0	598,549,119	87.74	83,632,881
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,976,523,000	1,976,522,740	0	1,976,522,740	100	260
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	64,910,000	58,711,244	0	58,711,244	90.45	6,198,756
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	379,515,000	2,723,615,000	2,633,783,103	0	2,633,783,103	96.7	89,831,897
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,537,000	17,825,000	0	0	0	0	17,825,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	20,537,000	17,825,000	0	0	0	0	17,825,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	380,448,000	363,192,000	272,582,623	0	272,582,623	75.05	90,609,377
522112	Belanja Langganan Telepon	8,400,000	9,000,000	3,685,200	0	3,685,200	40.95	5,314,800
522113	Belanja Langganan Air	32,400,000	32,567,000	24,379,950	0	24,379,950	74.86	8,187,050
522131	Belanja Jasa Konsultan	67,520,000	0	0	0	0		0
522141	Belanja Sewa	3,968,152,000	2,760,567,000	2,645,841,099	0	2,645,841,099	95.84	114,725,901
522151	Belanja Jasa Profesi	615,800,000	299,205,000	280,204,800	0	280,204,800	93.65	19,000,200
522191	Belanja Jasa Lainnya	199,320,000	615,824,000	603,452,493	0	603,452,493	97.99	12,371,507
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	5,272,040,000	4,080,355,000	3,830,146,165	0	3,830,146,165	93.87	250,208,835
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,113,508,000	509,754,000	418,795,938	0	418,795,938	82.16	90,958,062
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,113,508,000	509,754,000	418,795,938	0	418,795,938	82.16	90,958,062
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,889,914,000	5,941,412,000	5,862,957,800	147,595,858	5,715,361,942	96.2	226,050,058
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	219,750,000	572,474,000	546,120,000	160,000	545,960,000	95.37	26,514,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,082,890,000	1,082,884,680	0	1,082,884,680	100	5,320
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	791,374,000	3,638,317,000	3,473,664,141	63,126,804	3,410,537,337	93.74	227,779,663
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,901,038,000	11,235,093,000	10,965,626,621	210,882,662	10,754,743,959	95.72	480,349,041

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 3200 **KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA : 686239 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 9:35 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:15 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	17,373,043,000	22,235,564,000	21,266,795,916	228,834,760	21,037,961,156	94.61	1,197,602,844
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,294,000,000	1,292,893,461	0	1,292,893,461	99.91	1,106,539
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	1,294,000,000	1,292,893,461	0	1,292,893,461	99.91	1,106,539
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	1,294,000,000	1,292,893,461	0	1,292,893,461	99.91	1,106,539
	JUMLAH BELANJA	27,720,498,000	39,902,229,000	37,308,545,544	231,074,595	37,077,470,949	92.92	2,824,758,051

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
SATUAN KERJA : 686239

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 06/05/26 9:34 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1,066,250,000	229,234,000	225,422,500	3,215,872	222,206,628	98.34	7,027,372
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	0	27,880,000	26,680,000	0	26,680,000	95.7	1,200,000
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	0	95,950,000	58,628,140	0	58,628,140	61.1	37,321,860
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CQ	1,066,250,000	353,064,000	310,730,640	3,215,872	307,514,768	88.01	45,549,232
WA	Program Dukungan Manajemen							
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	42,350,000	13,245,000	12,987,000	0	12,987,000	98.05	258,000
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	255,466,000	35,385,000	29,433,300	0	29,433,300	83.18	5,951,700
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	24,494,488,000	25,365,698,000	23,132,090,434	20,741,933	23,111,348,501	91.19	2,254,349,499
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	1,861,944,000	5,380,920,000	5,069,428,672	207,116,790	4,862,311,882	94.21	518,608,118
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	26,654,248,000	30,795,248,000	28,243,939,406	227,858,723	28,016,080,683	91.72	2,779,167,317
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	27,720,498,000	31,148,312,000	28,554,670,046	231,074,595	28,323,595,451	91.67	2,824,716,549
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	8,753,917,000	8,753,875,498	0	8,753,875,498	100	41,502
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CQ	0	8,753,917,000	8,753,875,498	0	8,753,875,498	100	41,502
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	8,753,917,000	8,753,875,498	0	8,753,875,498	100	41,502
	JUMLAH	27,720,498,000	39,902,229,000	37,308,545,544	231,074,595	37,077,470,949	93.5	2,824,758,051

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
SATUAN KERJA : 686239

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 9:35 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	292,980,000	1,233,657,000	1,233,394,700	0	1,233,394,700	99.98	262,300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	88,000	749,000	18,893	235	18,658	2.49	730,342
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	26,808,000	112,078,000	68,556,126	0	68,556,126	61.17	43,521,874
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,468,000	61,902,000	16,581,357	0	16,581,357	26.79	45,320,643
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	42,400,000	89,210,000	71,440,000	540,000	70,900,000	79.48	18,310,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,360,000	50,800,000	39,004,000	0	39,004,000	76.78	11,796,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	209,292,000	283,876,000	5,388,142	0	5,388,142	1.9	278,487,858
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	25,696,000	112,566,000	69,957,720	0	69,957,720	62.15	42,608,280
511129	Belanja Uang Makan PNS	311,760,000	390,000,000	283,555,000	0	283,555,000	72.71	106,445,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	18,500,000	70,600,000	59,315,000	370,000	58,945,000	83.49	11,655,000
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,201,400,000	4,334,438,000	4,198,852,050	0	4,198,852,050	96.87	135,585,950
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	993,117,000	2,698,463,000	2,666,580,640	0	2,666,580,640	98.82	31,882,360
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	310,000	887,000	40,523	0	40,523	4.57	846,477
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	99,313,000	248,846,000	174,461,020	744,390	173,716,630	69.81	75,129,370
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	71,505,000	131,383,000	46,670,730	150,690	46,520,040	35.41	84,862,960
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	234,360,000	306,600,000	245,100,000	0	245,100,000	79.94	61,500,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	126,728,000	259,004,000	161,387,970	434,520	160,953,450	62.14	98,050,550
511628	Belanja Uang Makan PPPK	206,460,000	532,680,000	523,594,000	0	523,594,000	98.29	9,086,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	57,720,000	13,675,000	0	13,675,000	23.69	44,045,000
512211	Belanja Uang Lembur	190,446,000	178,932,000	118,600,000	0	118,600,000	66.28	60,332,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	196,850,000	415,405,000	165,970,000	0	165,970,000	39.95	249,435,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,601,850,000	2,009,970,000	1,839,028,451	0	1,839,028,451	91.5	170,941,549
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,472,764,000	2,792,899,000	2,747,684,845	0	2,747,684,845	98.38	45,214,155
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	10,347,455,000	16,372,665,000	14,748,856,167	2,239,835	14,746,616,332	90.08	1,626,048,668
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,138,773,000	3,209,780,000	2,989,307,956	17,952,098	2,971,355,858	92.57	238,424,142
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,668,000	3,600,000	287,000	0	287,000	7.97	3,313,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	341,304,000	229,640,000	217,394,000	0	217,394,000	94.67	12,246,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	186,660,000	174,944,000	160,500,023	0	160,500,023	91.74	14,443,977
521211	Belanja Bahan	379,515,000	251,780,000	168,162,200	0	168,162,200	66.79	83,617,800
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	36,000,000	29,805,000	0	29,805,000	82.79	6,195,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,537,000	17,825,000	0	0	0	0	17,825,000
522111	Belanja Langganan Listrik	380,448,000	345,180,000	254,572,108	0	254,572,108	73.75	90,607,892
522112	Belanja Langganan Telepon	8,400,000	8,400,000	3,085,200	0	3,085,200	36.73	5,314,800
522113	Belanja Langganan Air	32,400,000	26,800,000	18,614,150	0	18,614,150	69.46	8,185,850
522131	Belanja Jasa Konsultan	67,520,000	0	0	0	0	0	0
522141	Belanja Sewa	3,968,152,000	2,213,065,000	2,098,339,099	0	2,098,339,099	94.82	114,725,901
522151	Belanja Jasa Profesi	615,800,000	214,405,000	195,404,800	0	195,404,800	91.14	19,000,200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
SATUAN KERJA : 686239

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 9:35 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522191	Belanja Jasa Lainnya	199,320,000	611,824,000	599,452,493	0	599,452,493	97.98	12,371,507
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,113,508,000	507,879,000	416,920,938	0	416,920,938	82.09	90,958,062
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,889,914,000	2,922,799,000	2,844,350,014	147,595,858	2,696,754,156	92.27	226,044,844
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	219,750,000	230,447,000	204,093,000	160,000	203,933,000	88.49	26,514,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	532,408,000	532,402,680	0	532,402,680	100	5,320
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	791,374,000	1,944,871,000	1,780,229,757	63,126,804	1,717,102,953	88.29	227,768,047
	JUMLAH BELANJA BARANG	17,373,043,000	13,481,647,000	12,512,920,418	228,834,760	12,284,085,658	92.81	1,197,561,342
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,294,000,000	1,292,893,461	0	1,292,893,461	99.91	1,106,539
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	1,294,000,000	1,292,893,461	0	1,292,893,461	99.91	1,106,539
	JUMLAH RUPIAH MURNI	27,720,498,000	31,148,312,000	28,554,670,046	231,074,595	28,323,595,451	91.67	2,824,716,549
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	33,143,000	33,140,550	0	33,140,550	99.99	2,450
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	17,815,000	17,814,560	0	17,814,560	100	440
521211	Belanja Bahan	0	430,402,000	430,386,919	0	430,386,919	100	15,081
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,976,523,000	1,976,522,740	0	1,976,522,740	100	260
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	28,910,000	28,906,244	0	28,906,244	99.99	3,756
522111	Belanja Langganan Listrik	0	18,012,000	18,010,515	0	18,010,515	99.99	1,485
522112	Belanja Langganan Telepon	0	600,000	600,000	0	600,000	100	0
522113	Belanja Langganan Air	0	5,767,000	5,765,800	0	5,765,800	99.98	1,200
522141	Belanja Sewa	0	547,502,000	547,502,000	0	547,502,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	0	84,800,000	84,800,000	0	84,800,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,875,000	1,875,000	0	1,875,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	3,018,613,000	3,018,607,786	0	3,018,607,786	100	5,214
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	342,027,000	342,027,000	0	342,027,000	100	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	550,482,000	550,482,000	0	550,482,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,693,446,000	1,693,434,384	0	1,693,434,384	100	11,616
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	8,753,917,000	8,753,875,498	0	8,753,875,498	100	41,502
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	8,753,917,000	8,753,875,498	0	8,753,875,498	100	41,502
	TOTAL	27,720,498,000	39,902,229,000	37,308,545,544	231,074,595	37,077,470,949	93.5	2,824,758,051

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:35 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	35,403,788,152	(35,403,788,152)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	1,279,625,433	(1,279,625,433)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	36,683,413,585	(36,683,413,585)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	22,642,899	22,642,899	0	0.00
Peralatan dan Mesin	14,674,091,634	13,977,141,173	696,950,461	4.99
Gedung dan Bangunan	161,218,481	161,218,481	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(10,170,109,094)	(9,540,017,464)	(630,091,630)	6.60
JUMLAH ASET TETAP	4,687,843,920	4,620,985,089	66,858,831	1.45
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	77,200,000	(77,200,000)	(100.00)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	146,441,816	0	146,441,816	0.00
Aset Lain-lain	77,200,000	0	77,200,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(77,200,000)	(77,200,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	146,441,816	0	146,441,816	
JUMLAH ASET	4,834,285,736	41,304,398,674	(36,470,112,938)	(88.30)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	148,590,322	38,092,334	110,497,988	290.08
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	148,590,322	38,092,334	110,497,988	290.08
JUMLAH KEWAJIBAN	148,590,322	38,092,334	110,497,988	290.08
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,685,695,414	41,266,306,340	(36,580,610,926)	(88.65)
JUMLAH EKUITAS	4,685,695,414	41,266,306,340	(36,580,610,926)	(88.65)
JUMLAH EKUITAS	4,685,695,414	41,266,306,340	(36,580,610,926)	(88.65)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,834,285,736	41,304,398,674	(36,470,112,938)	(88.30)

Keterangan :

FINAL

TANJUNGPINANG, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KRA

RIDWAN

NIP. 198507092010011020

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	37,077,470,949
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	17,420,332	0
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,420,332
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,233,394,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,893	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	68,556,126	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,581,357	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	71,440,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	39,004,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,388,142	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	69,957,720	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	283,555,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	59,315,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,198,852,050	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,666,580,640	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	40,523	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	174,461,020	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	46,670,730	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	245,100,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	161,387,970	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	523,594,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	13,675,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	118,600,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	165,970,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,839,028,451	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,747,684,845	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,022,448,506	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	287,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	235,208,560	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	160,500,023	0
3.0	521211	Belanja Bahan	598,549,119	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,976,522,740	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	58,711,244	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	272,582,623	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,685,200	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	24,379,950	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,645,841,099	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	280,204,800	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:34 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	603,452,493	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	418,795,938	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,862,957,800	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	546,120,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,082,884,680	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,473,664,141	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,292,893,461	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	235
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	540,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	744,390
3.1	511622	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	150,690
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	434,520
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	17,952,098
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	147,595,858
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	160,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	63,126,804
JUMLAH			37,325,965,876	37,325,965,876

Keterangan :

FINAL

TANJUNGPINANG, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KRA

RIDWAN

198507092010011020

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	22,642,899	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	14,674,091,634	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	161,218,481	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,152,375,059
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	17,734,035
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	146,441,816	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	77,200,000	0
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	77,200,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	2,148,506
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	146,441,816
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	28,323,595,451
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	17,420,332	0
0.0	313211	Transfer Keluar	44,434,700	0
0.0	391111	Ekuitas	0	41,266,306,340
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,774,800	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	26,646,005,322	0
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,513,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,230,370,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	18,190	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68,361,566	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	16,555,325	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	70,900,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	40,084,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,359,785	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	69,957,720	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	283,555,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	58,945,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,198,852,050	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	2,667,567,040	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	40,981	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	173,774,950	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	46,543,368	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	245,100,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	160,953,450	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	523,594,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	13,675,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	118,600,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:34 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	165,970,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,823,479,451	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,747,684,845	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,999,412,091	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	287,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	235,208,560	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	160,500,023	0
3.0	521211	Beban Bahan	598,549,119	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,963,867,740	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	58,711,244	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	272,582,623	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,685,200	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	24,379,950	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,925,466,532	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	280,204,800	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	603,452,493	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	418,795,938	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,713,831,942	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	545,960,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,082,884,680	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,410,537,337	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,176,600,760	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,224,370	0
JUMLAH			79,999,314,207	79,999,314,207

Keterangan :

FINAL

TANJUNGPINANG, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KRA

RIDWAN

NIP. 198507092010011020

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 7:34 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	435,313	(435,313)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	435,313	(435,313)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	435,313	(435,313)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	14,729,941,821	9,976,010,895	4,753,930,926	47.654
Beban Persediaan	0	205,215,000	(205,215,000)	(100)
Beban Barang dan Jasa	11,126,307,375	72,255,044,259	(61,128,736,884)	(84.601)
Beban Pemeliharaan	418,795,938	1,396,832,047	(978,036,109)	(70.018)
Beban Perjalanan Dinas	10,753,213,959	80,544,320,316	(69,791,106,357)	(86.649)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : (01) **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : (3200) **KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA : (686239) **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:34 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,179,825,130	1,072,838,427	106,986,703	9.972
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	38,208,084,223	165,450,260,944	(127,242,176,721)	(76.907)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(38,208,084,223)	(165,449,825,631)	127,241,741,408	(76.907)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	6,520,000	(6,520,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	6,520,000	(6,520,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13,513,000	172,452,823	(158,939,823)	(92.164)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13,513,000	172,452,823	(158,939,823)	(92.164)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	13,513,000	178,972,823	(165,459,823)	(92.45)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(38,194,571,223)	(165,270,852,808)	127,076,281,585	(76.89)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(38,194,571,223)	(165,270,852,808)	127,076,281,585	(76.89)

Keterangan :
FINAL

TANJUNGPINANG, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KRA

RIDWAN
NIP. 198507092010011020

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:34 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	41,266,306,340	42,645,220,914	(1,378,914,574)	(3.23)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(38,194,571,223)	(165,270,852,808)	127,076,281,585	(76.89)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(26,647,780,122)	9,345,000	(26,657,125,122)	(285,25 5.49)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,774,800)	9,345,000	(11,119,800)	(118.99)
LAIN-LAIN	(26,646,005,322)	0	(26,646,005,322)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	28,261,740,419	163,882,593,234	(135,620,852,815)	(82.75)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(36,580,610,926)	(1,378,914,574)	(35,201,696,352)	2,552.8 6
EKUITAS AKHIR	4,685,695,414	41,266,306,340	(36,580,610,926)	(88.65)

Keterangan :

FINAL

TANJUNGPINANG, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

RIDWAN

NIP. 198507092010011020

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama UAPPAW : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Eselon 1 : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kode dan Nama K/L : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditlkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditlkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak

10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
	a. Pagu/DIPA		✓	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		✓	Tidak
	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah Saldo tidak Normal? (jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		✓	Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi ent	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			

1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		✓	Tidak
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		✓	Tidak
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		✓	Tidak
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		✓	Tidak
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		✓	Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP AkruaI?		✓	Tidak
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		✓	Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya

5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		✓	Tidak
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		✓	Tidak
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)	✓		Ya
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		✓	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	✓		Ya
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal + Kenaikan/ Penurunan Ekuitas - Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		✓	Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	✓		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	✓		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada”		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Tidak

7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya
	- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ya
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ya
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan AkruaI?		✓	Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		✓	Tidak
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan		✓	Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan		✓	Tidak
	Pengecekan Jurnal Manual AkruaI pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca		✓	Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211)		✓	Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca		✓	Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan		✓	Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada	✓		Ya
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		✓	Tidak
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		✓	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?		✓	Tidak
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun		✓	Tidak
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit)		✓	Tidak
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun		✓	Tidak
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx,		✓	Tidak
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas		✓	Tidak
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		✓	Tidak
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di		✓	Tidak
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU		✓	Tidak
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada		✓	Tidak
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun		✓	Tidak
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Penyusun LKKL,



Dhea Adilah Putri
NIP. 200302022025052003

Tanjungpinang, 05 Mei 2026

Penelaah,



Ridwan, S.H
NIP. 198507092010011020